

Analisis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia

Oleh : Yolanda

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur dan Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur

ABSTRACT

Economic globalization has increased interdependence and sharpens competition. For many countries in the world, economic globalization challenges / barriers that limit trade and opportunity. Challenges and opportunities that require competitiveness strategy. In international trade, competitiveness is determined by comparative advantage (comparative advantage) and competitive advantage (competitive advantage).

Indonesia's export growth in the past three years has decreased, this condition is caused by high oil prices and the purchasing power of the receiving State the export of which is low due is still not completely out of the economic crisis. Meanwhile import growth has increased, so that the trade balance deficit. The trade deficit, the first time facing Indonesia.

PENDAHULUAN

Masalah utama yang dihadapi sebagian besar negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah sangat kurangnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini mengingat pendapatan masyarakat yang masih rendah sehingga tabungan masyarakat juga rendah dibanding dengan kebutuhan investasi. Untuk mengatasi masalah kurangnya dana untuk pembiayaan pembangunan maka dapat dilakukan dengan mengundang modal dari luar negeri baik jangka panjang maupun jangka pendek. Arus modal jangka panjang dapat berupa investasi langsung (direct foreign investment) atau pinjaman jangka panjang. Sedangkan dana jangka pendek berupa investasi portfolio yang

bermaksud mengambil keuntungan dari jual beli efek (capital gain) dipasar modal.

Pembiayaan pembangunan dengan cara-cara tersebut menuntut kewajiban pembayaran dimasa datang, apalagi dikaitkan melemahnya mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing sehingga semakin memberatkan neraca pembayaran dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban utang luar negeri tersebut diperlukan penerimaan devisa yang besar. Penerimaan devisa ini sangat penting, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Devisa dibutuhkan untuk (1) membayar impor sekarang, (2) jaminan pembayaran impor tiga bulan mendatang, (3) membayar utang luar negeri dan bunganya, dan (4) mendukung stabilitas nilai Rupiah.

Penerimaan devisa diharapkan dari perdagangan luar negeri, dimana perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP, serta turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan (trade as engine of growth, Salvatore, 2004). Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Tambunan (2005) menyatakan pada awal tahun 1980-an Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa export promotion. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan.

Melihat besarnya peranan perdagangan luar negeri, maka diperlukan kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri yang tujuannya untuk meningkatkan penerimaan devisa. Masing-masing negara memiliki kebijakan perdagangan sendiri-sendiri,

karena kebijakan perdagangan luar negeri tersebut mempunyai tujuan antara lain :

1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruh dari kondisi perdagangan internasional yang tidak menguntungkan.
2. Menjaga stabilitas neraca pembayaran
3. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil
4. Menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya.

Melakukan perdagangan luar negeri tidak semudah yang dibayangkan karena adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh untuk masuk batas wilayah suatu negara tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah berupa tarif dan non tarif, pajak, subsidi ekspor dan subsidi produksi. Tujuan pemberlakuan ketentuan tarif adalah dalam rangka melindungi industri dalam negeri agar bisa hidup dan mampu bersaing dengan produk yang masuk dan non tarif merupakan cara untuk menghambat/mengurangi arus barang masuk. Hambatan-hambatan ini akan dapat mengurangi penerimaan devisa dari perdagangan internasional.

Berdasarkan fenomena yang sedang berkembang sekarang banyak negara-negara didunia membentuk blok-blok perdagangan, seperti OPEC, AFTA,

NAFTA, WTO, Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan yang terakhir adalah MEA. Disamping itu ditambah dengan karakteristik ekonomi dunia menuju abad 21 adalah persaingan global atau pasar bebas, mengakibatkan terbukanya kegiatan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar atau sesama blok perdagangan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi yang positif selama masa krisis finansial global dan Indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional. Hal ini terbukti dari meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Indonesia berhasil meraih peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009. Peringkat layak investasi Indonesia menurut S&P juga mengalami peningkatan dari BB menjadi BBB, hal ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata global.

Kondisi perekonomian di Tanah Air sepanjang 2011 bisa dibilang kuat dan stabil, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen dengan inflasi sebesar 3,79 persen. Hal ini sesuai data yang di dapat dari IMF (International

Monetary Financial). Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih tinggi (6,3-6,8 % dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia tersebar 4 1%.) sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia. Tahun 2014 diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi global yang tidak stabil, yang tidak saja dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang, tetapi juga dialami oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia. Kondisi perekonomian global tersebut ini merupakan dampak dari berbagai perkembangan yang terjadi baik di kawasan regional maupun global seperti krisis yang tengah berlangsung antara Rusia – Ukraina yang kembali melemahkan perekonomian di kawasan Euro setelah sebelumnya berhasil bangkit pasca krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2013.

Sepanjang Januari-November 2014, ekspor nonmigas tercatat mencapai 82.69 % sedangkan ekspor migas hanya sebesar 17.31%. Kontribusi terbesar ekspor nonmigas berasal dari industri pengolahan yang menyumbang sebesar 66.51%.

Neraca dari perdagangan Internasional Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TOTAL Periode : 2010-2014

(Nilai : Juta US\$)

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	TREND(%) 2010-2014
I	E X P O R T	157.779,1	203.496,6	190.020,3	182.551,8	176.292,5	1,14
	- OIL & GAS	28.039,6	41.477,0	36.977,3	32.633,0	30.331,9	-0,82
	- NON OIL & GAS	129.739,5	162.019,6	153.043,0	149.918,8	145.960,6	1,59
II	I M P O R T	135.663,3	177.435,6	191.689,5	186.628,7	178.178,8	6,14
	- OIL & GAS	27.412,7	40.701,5	42.564,2	45.266,4	43.459,9	10,83
	- NON OIL & GAS	108.250,6	136.734,0	149.125,3	141.362,3	134.718,9	4,82

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui nilai ekspor dan impor selama kurun waktu 2010 s/d 2015 (agustus);

1. Trend pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 1,14 % dan trend pretumbuhan impor sebesar 6,14 %
2. Rendahnya trend pertumbuhan ekspor di picu oleh pertumbuhan oil&gas yang pertumbuhannya negatif.
3. Tingginya trend pertumbuhan impor disebabkan oleh tingginya tren pertumbuhan impor oil & gas (10,83 %) dan non oil & gas (4,825).

Kegiatan impor terjadi karena faktor-faktor berikut.

1. Negara pengimpor kekurangan supply beberapa barang tertentu.

2. Negara belum mampu memproduksi barang yang dibutuhkan.
3. Biaya produksi yang mahal.
4. Permintaan pasar atau selera konsumen yang berbeda-beda juga merupakan penyebab importir mendatangkan barang dari luar negeri.
5. Dan lain-lainnya.

Kegiatan impor tersebut, di satu pihak sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya dalam negeri, tetapi di lain pihak dapat merugikan perkembangan industri dalam negeri. Agar kegiatan impor tersebut tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor antara lain :

- a) Pengenaan Bea Masuk

- b) Kuota Impor
- c) Pengendalian Devisa
- d) Substitusi Impor
- e) Dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kegiatan ekspor di perlukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekspor tersebut. Kebijakan untuk mendorong ekspor adalah

- a) Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor

PERMASALAHAN

Dengan terbukanya ekonomi suatu negara terhadap dunia luar (Indonesia sebagai anggota WTO, APEC , AFTA NAFTA, dan MEA) , bagaimana kemungkinan perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia dan kemungkinan – kemungkinan kebijakan tarif dan non tarif yang di perlakukan pemerintah.

BAHAN DAN METODE

Analisis perdagangan internasional terutama menitik beratkan kepada transaksi-transaksi riil dalam perekonomian internasional, yaitu transaksi yang meliputi pergerakan barang secara fisik atau suatu komitmen atas sumber daya ekonomi yang tampak.

Pergerakan barang secara fisik keluar dari batas suatu negara dinamakan

- b) Subsidi Ekspor
- c) Premi / insentif Ekspor
- d) Devaluasi
- e) Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri
- f) Menjaga Kestabilan Nilai Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Asing
- g) Dan lain-lain.

ekspor dan pergerakan barang secara fisik tersebut memasuki batas wilayah suatu negara dinamakan impor. Kegiatan impor dari suatu negara mengakibatkan adanya aliran uang keluar dari suatu negara dan ekspor adanya aliran uang keluar dari suatu negara.

Teori Perdagangan Internasional

Perkembangan teori perdagangan internasional dimulai sejak abad ke 17 sampai ke abad 20 an. Teori ini memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi dasar dan keuntungan perdagangan dan bagaimana pola perdagangan tersebut.

Teori perdagangan internasional tersebut adalah :

1. Teori Merkantilisme

Kaum merkantilisme percaya bahwa sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan dari

perdagangan dengan mengorbankan negara lainnya. Sebagai akibatnya mereka menganjurkan agar dilakukan pembatasan yang ketat terhadap impor, membelikan intensif terhadap ekspor serta memberlakukan peraturan pemerintah yang ketat terhadap semua aktifitas ekonomi.

2. Teori Klasik

a. Adam Smith

Perdagangan didasarkan pada keunggulan absolute dan akan menguntungkan kedua belah pihak. Artinya jalur setiap negara melakukan spesialisasi pada produksi komoditi yang memiliki keunggulan absolute dan menukarkan sebagian output ini untuk memperoleh output yang memiliki absolute, maka kedua negara akan dapat mengkonsumsi lebih banyak kedua komoditi.

b. Davis Ricardo

Perdagangan didasarkan atas keunggulan komparative. Teori ini mengatakan bahwa meskipun salah satu negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, masih terdapat dasar

dilakukannya perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak (sepanjang proporsi kerugian absolute satu negara pada kedua komoditi tidak sama) negara yang kurang efisien harus berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang kerugian absolute lebih sedikit.

3. Teori Modern

a. Teori Heekseher Ohim

Perdagangan internasional berlangsung atas dasar keunggulan komparative yang berbeda dari masing-masing negara. Teori ini juga menyinggung mengenai dampak perdagangan internasional terhadap harga atau tingkat pendapatan dari masing-masing faktor produksi.

b. The equalization of factor prices (kesamaan harga faktor produksi)

Teori ini dikemukakan oleh P. Samrelson dan menyatakan bahwa perdagangan bebas cenderung melibatkan harga faktor produksi sama di berbagai negara, teori ini didasarkan pada teori faktor proportions, dimana

selama suatu negara memperbanyak produksi terhadap suatu barang (banyak mempergunakan TK), maka permintaan terhadap tenaga kerja bertambah. Sebaliknya produksi barang yang banyak mempergunakan kapital akan berkurang dan hal ini cenderung menurunkan upah dan menaikkan harga kapital.

c. JAMES MEADE

Mengemukakan tentang general quilibrium (Offer curve) yaitu menjelaskan bagaimana terjadinya keseimbangan harga internasional. Hal ini dapat digambarkan dengan metode, dimana tiap negara berupaya mengembangkan produksi atas dasar tersedia faktor endowment dan melakukan perdagangan internasional maka keuntungan akan diperoleh melalui spesialisasi dalam produksi serta ekspor barang-barang mereka.

Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) dari

neraca pembayaran internasional, khususnya terhadap ekspor dan impor barang dan jasa.

Jenis kebijakan perdagangan internasional ini adalah :

1. Tarif terhadap impor dan ekspor dan non tarif
2. Bilateral trade agreement
3. Strate trading
4. Quota
5. Subsidi

Kebijakan perdagangan internasional ini diatas dapat menghambat perdagangan yang terjadi dari 2 negara atau lebih.

1.1 Tarif dan Non Tarif

Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara.

Tarif dapat digolongkan menjadi :

1. Bea ekspor (exspor duties) adalah pajak bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkat menuju ke negara lain.
2. Bea transito (transit duties) adalah pajak/bea yang dikeluarkan terhadap barang-barang yang melewati wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
3. Bea impor (impor duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap

barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Tarif ini juga dapat dibedakan menurut jenisnya yaitu :

1. Advalorem duties yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut.
2. Specific duties yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik barang
3. Spesific ad valorem atau compound duties yakni bea yang merupakan kombinasi antara spesifik dan ad valorem.

Pembebanan tarif secara ekonomi dapat untuk memperbaiki dasar tukar (term of trade), perlindungan luar negeri, employment dan anti dumpug. Hal ini disebabkan, karena pembebanan tarif akan mengakibatkan menurunnya kuantitas impor suatu negara akibat tingginya harga barang-barang impor dan akhirnya merangsang peningkatan produksi dalam negeri yang bermuara terhadap peningkatan nilai ekspor.

A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) sebagai berikut :

1. Pembatasan spesifik (*specific limitation*) :

- a. Larangan impor secara mutlak
- b. Pembatasan impor (*quota system*)
- c. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu
- d. Peraturan kesehatan / karantina
- e. Peraturan pertahanan dan keamanan negara
- f. Peraturan kebudayaan
- g. Perizinan impor (*import licence*)
- h. Embargo
- i. Hambatan pemasaran / marketing

2. Peraturan bea cukai (*customs administration rules*)

- a. Tatalaksana impor tertentu (procedure)
- b. Penetapan harga pabean
- c. Penetapan forex rate (kurs valas) dan pengawasan devisa (*forex control*)
- d. Consulate formalities
- e. Packaging / labelling regulations
- f. Documentation needed
- g. Quality and testing standard
- h. Pungutan administasi (*fees*)
- i. Tariff classification

3. Partisipasi pemerintah (*government participation*)

- a. Kebijakan pengadaan pemerintah
- b. Subsidi dan insentif ekspor
- c. *Countervailing duties*
- d. *Domestic assistance programs*
- e. *Trade-diverting*

4. *Import charges*

- a. *Import deposits*
- b. *Supplementary duties*
- c. *Variable levies*

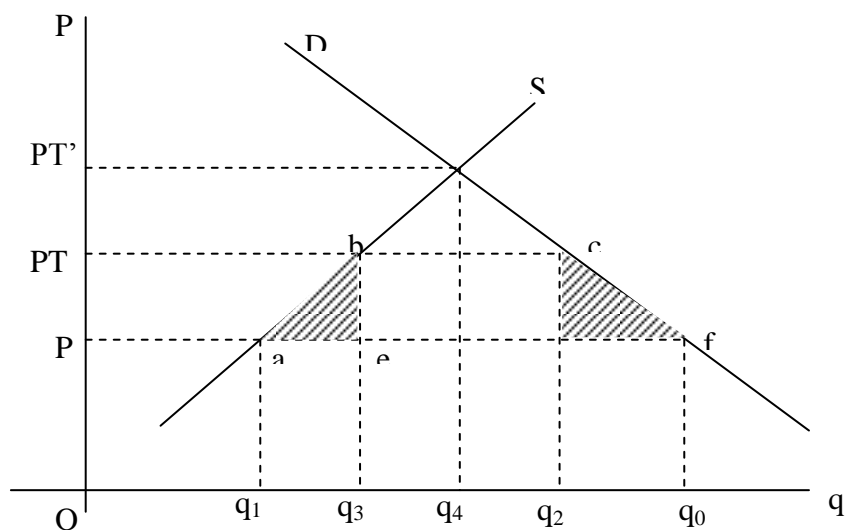
Selanjutnya menurut Hamdy Hady, hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat

menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Sementara itu kebijakan non tarif lainnya dapat berupa ketentuan yang bersifat standar teknis, standar kesehatan, standar produksi, standar teknologi, dan standar lainnya yang makin canggih terutama sebagaimana diterapkan oleh negara maju untuk melindungi pasar domestiknya seperti :

1. *Sanitary and phyto sanitary measures* adalah standar yang ditetapkan untuk produk pertanian.
2. *Technical barrier to trade* misalnya negara tujuan menerapkan suatu standar secara unilateral yang tidak didasarkan atas standar internasional
3. Lingkungan hidup
4. Standar buruh

Efek pembebanan tarif ini dapat dilihat pada kasus suatu negara sebagai berikut Asumsi :

- Caustant opportunity cost produksi
- Tak ada tarif terhadap bahan mentah



Sumber : Nopirin

Gambar 1 : Efek tarif impor bagi negara A

5. *Rules of origin* merupakan ketentuan asal barang serta hal yang lain yang dapat menghambat perdagangan.

Efek Tarif Dan Non Tarif

Pembebanan tarif terhadap suatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Efek yang ditimbulkan dari pembebanan tarif ini dapat berupa :

1. Perubahan harga (*prices effect*)
2. Perubahan kuantitas konsumsi (*comsumption effect*)
3. Perubahan kuantitas produksi atau produk (*production effect/import substitution effect*)
4. Perubahan redistribusi pendapatan (*redistributor effect*)

Keterangan :

Constant opportunity cost disini berarti bahwa produsen luar negeri mau menerima harga yang tetap berapapun jumlah yang akan diminta oleh konsumen didalam negeri sebelum pembebanan tarif.

- a. OP = harga konstan yang ditetapkan oleh produsen diluar negeri, sehingga produsen dalam negeri harus menjual dengan harga yang sama sebagai akibat persaingan dengan produsen luar negeri.
- b. Oq_1 = produksi dalam negeri
- c. Oq_0 = konsumsi dalam negeri
- d. Produksi < konsumsi, mengakibatkan adanya impor sebesar q_1, q_0

Sesudah pembebanan tarif

Besarnya nilai impor yang terjadi, maka negara A membebankan tarif

sebesar PPT atau harga barang sebesar OPT. Akibat pembebanan tarif ini maka :

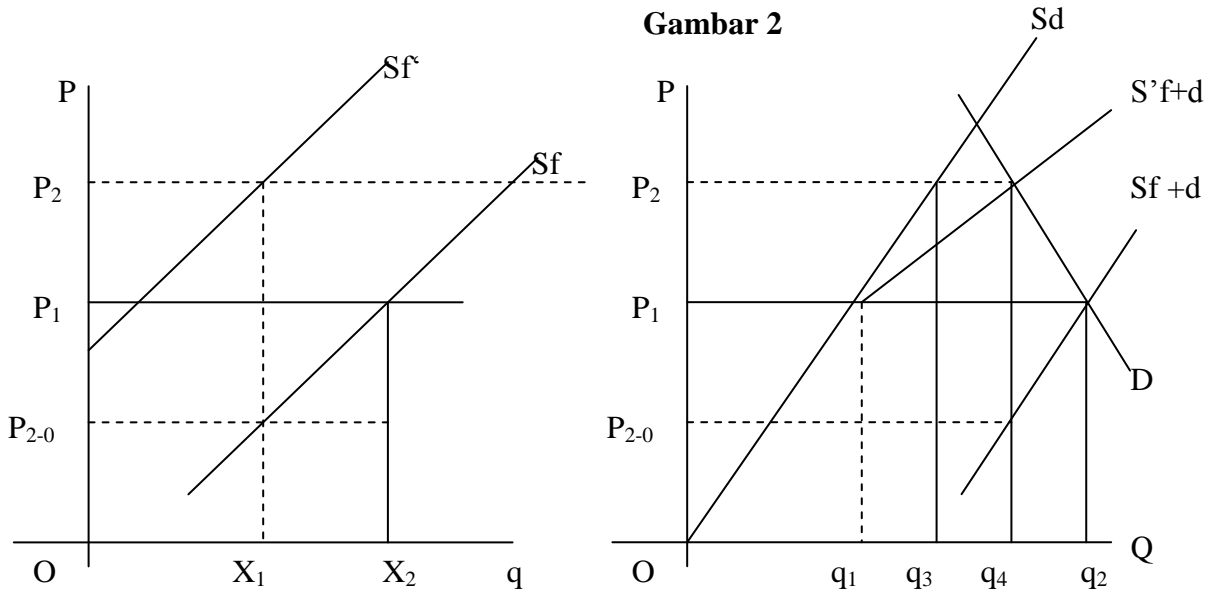
- a. Harga barang naik OPT
- b. Jumlah barang yang diminta/konsumsi turun menjadi Oq_2
- c. Produksi dalam negeri naik menjadi Oq_3

Akibat pembebanan tarif ini :

- a. Impor menurun sebesar q_2q_0
- b. Adanya pendapatan pemerintah sebesar BCDE
- c. Produsen dalam negeri mendapat tambahan pendapatan sebesar PPTba
- d. Kerugian yang dialami konsumen akibat pembebanan tarif ini adalah abe dan cdf

Apabila kasusnya dalam keadaan increasing cost produksi : turunya jumlah impor akibat pembebanan tarif maka produksi luar negeri juga turun dan ongkos permintaan juga turun; sehingga harga didalam negeri lebih tinggi dari pada harga diluar negeri sebesar tarif, tetapi harga ini tidak setinggi harga luar negeri sebelum dikenakan tarif dengan jumlah yang sama. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keadaan increasing Cost



Sumber : Nopirin

Keterangan :

S_d = kurva penawaran produsen dalam negeri

D = kurva permintaan

$S_f + d$ = jumlah penawaran luar negeri + dalam negeri

S_f = kurva penawaran produsen luar negeri

Sebelum tarif :

a. Harga equilibrium = OP

b. Impor = q_1 , $q_2 = OX_1$

Setelah pembebanan tarif :

a. Kurva penawaran luar negeri bergeser dari s_f ke s_f^* dan kurva penawaran dalam negeri dari s_f+d menjadi $s_f^* + d$

b. Akibatnya :

- Impor dari OX_1 atau q_1q_2 menjadi OX_2 atau q_3q_4 (impor turun sebesar X_2X_1)

- Harga bagi produsen luar negeri OP_{2-t}

Harga penawaran luar negeri dalam hal ini tergantung dari impor negara A sehingga impor oleh negara A menyebabkan turunnya harga penawaran luar negeri, hal ini menyebabkan kenaikan harga dalam negeri menjadi lebih kecil hanya sampai P_2 , sehingga efeknya terhadap produksi dan konsumsi menjadi lebih kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Perdagangan

Luar Negeri Indonesia :

a. Perkembangan ekspor

Indonesia :

Pada 1990 nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 25.673,3 juta, naik 15,86 % dari tahun 1989. Kenaikan nilai ekspor tersebut tidak berlanjut pada tahun 1991, namun tahun 1992 mengalami kenaikan kembali sebesar 16,56 % dibanding tahun 1991. Pertumbuhan nilai ekspor Indonesia pernah mengalami penurunan pada tahun 1998, dimana saat itu terjadinya krisis Ekonomi yang dialami banyak negara didunia. Tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor yang pesat, untuk non migas dan migas yaitu menjadi US\$ 62.124,0 juta (27,66 %) . Namun peningkatan tersebut tidak berlanjut ditahun berikutnya. Pada tahun 2001 total ekspor hanya sebesar US\$ 56.320,9 juta (menurun 9,34%). Di tahun 2003 ekspor mengalami peningkatan

menjadi US\$ 61.058,2 juta atau naik 6,82% banding eskpor tahun 2002 yang sebesar US\$ 57.158,8 juta. Tahun 2004 ekspor kembali mengalami peningkatan menjadi US\$ 71.584,6 juta (naik 17,24%). Pada tahun 2006 nilai ekspor menembus angka US\$ 100 juta yaitu US\$ 100.798,6 juta atau naik 17,67%. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai ekspor yang terbesar terjadi sebesar 14,97 % dibanding tahun 2008. Penurunan nilai pertumbuhan ekspor indonesia pada tahun 2009 terjadi disebabkan oleh. krisis finansial global yang berimbas kepada ekonomi Indonesia melalui sektor keuangan dan sektor ekspor. Dampak krisis finansial terhadap sektor keuangan dirasakan selama tahun 2008, yaitu dengan anjloknya nilai tukar Rupiah, turunnya indeks harga saham karena larinya investor asing, pelarian modal baik dari bursa saham maupun pasar obligasi Pemerintah. Akibatnya likuiditas sektor

keuangan sangat ketat, inflasi tinggi, tingginya risiko usaha, dan makin besarnya cost of money. Sementara itu sektor riil menghadapi dampak krisis finansial global ini dengan makin surutnya pasar ekspor kenegara maju terutama Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa, yang merupakan pasar ekspor utama Indonesia selama ini.

Penurunan pertumbuhan nilai ekspor Indonesia tersebut diikuti pada tahun 2012, 2013 dan 2014 (tabel 1). Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2012, ekonomi Indonesia dibayangi oleh tekanan harga minyak mentah dunia yang terus meningkat dan lesunya pasar ekspor terutama untuk tujuan ke negara Eropa yang masih lesu perekonomiannya, dimana disebabkan oleh persoalan global seperti krisis utang Eropa, bencana alam di berbagai negara, seperti tsunami di Jepang, banjir Thailand dan bencana di China, serta ketidakstabilan politik dan keamanan di Libya, Mesir dan

Tunisia yang mengganggu pasokan minyak dunia.

Melihat pertumbuhan ekspor Indonesia yang semakin menurun, maka pemerintah perlu mengembangkan industri berbasis ekspor, menghilangkan kendala (*bottleneck*) infrastruktur dan hambatan regional dalam perdagangan internal dan antar daerah, menggalakkan dan mendiversifikasi produksi dan basis ekspor Indonesia ke wilayah tujuan ekspor yang baru dan meningkatkan daya saing produk ekspor.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, Pemerintah telah melakukan deregulasi kebijakan dengan merevisi beberapa peraturan lintas kementerian yang memudahkan bagi investor atau pelaku bisnis. Selain itu Kementerian Perindustrian telah menetapkan beberapa fasilitasi/insentif yang telah diberikan kepada investor antara lain: (1). *Fasilitas tax holiday*, diberikan kepada kepada industri pionir dengan minimal investasi Rp. 1 Triliun

dan telah berbadan hukum setelah 15 Agustus 2010. (2). Fasilitas tax allowance, Fasilitas ini diberikan kepada investasi baru atau perluasan di sektor industri yang memenuhi syarat tertentu.

Dibidang perdagangan pemerintah telah melakukan upaya-upaya, khususnya untuk meningkatkan ekspor yaitu perbaikan fasilitasi perdagangan, National and ASEAN *Single Window* (satu jendela layanan pengurusan dokumen ekspor dan impor), prosedur ke-pelabuhanan harus terintegrasi dengan prosedur pengurusan perdagangan dan penggunaan sistim dokumen on line dan elektronik.

b. Perkembangan Impor

Indonesia :

Pengeluaran untuk impor pada tahun 1989 bernilai US\$ 16.359,6 juta dan pada tahun 1990 naik sebesar 33,48 %. Namun setelah itu pertumbuhan nilai impor lebih rendah dari tahun sebelumnya

dan bahkan pada tahun tahun 1998 pertumbuhan impor minus 33,59 %. Hal ini antara lain diakibatkan karena relatif mahalnya harga barang impor berkaitan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, disamping menurunnya berbagai kegiatan investasi dan konsumsi serta kesulitan dalam melakukan pembukaan L/C yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan internasional terhadap perbankan nasional. Disamping itu juga karena daya beli masyarakat rendah. Pada tahun 2000 pertumbuhan impor naik secara dratis (39,63%), karena Indonesia dapat keluar dari krisis moneter yang dihadapi. Sementara itu tahun 2005, Indonesia hanya dapat mengimpor barang sebanyak US\$ 57.700,9 juta, sedangkan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar US\$ 61.065,5 juta. Peningkatan ini tidak terlalu signifikan karena pada tahun selanjutnya 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikan yang sangat drastis

yaitu US\$ 129.197,3 juta (73,48 %), hal ini dikarenakan pada tahun 2008 Indonesia sedang mengalami krisis Ekonomi, dimana tingkat inflasi tinggi dan menyebabkan harga di pasaran meningkat dan pemerintah lebih memilih impor. Pada tahun 2009 Indonesia mengalami penurunan impor pasca krisis, yaitu sebesar US\$ 96.829,2 juta. Indonesia mengalami nilai impor tertinggi pada tahun 2012, peningkatan impor ini diakibatkan oleh meningkatnya impor non migas dan migas. Selain itu, kenaikan impor juga dipengaruhi oleh meningkatnya impor bahan baku dan barang modal. Laju pertumbuhan impor. Namun pada tahun 2013 dan 2014 Indonesia dapat menekan pertumbuhan sektor impor dibawah 5 %.

2. Neraca Perdagangan Indonesia

Kondisi Neraca perdagangan Indonesia tahun 1989 sampai tahun 2012 selalu surplus, walaupun Indonesia sempat mengalami krisis moneter tahun 1998 dan krisis

ekonomi tahun 2008. Seiring dengan krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 tersebut perdagangan internasional Indonesia mengalami penurunan tajam pada surplus perdagangan total, dimana surplus perdagangan tersebut anjlok hingga hanya sebesar US\$ 7.823,1 juta. Tahun 2009 terjadi peningkatan surplus dan membaik ke level US\$ 19.680,8 Juta . Kondisi neraca perdagangan ini terus naik sampai tahun 2012. Sementara itu di tahun 2013 dan 2014 neraca perdagangan Indonesia mengalami deficit, dimana pertumbuhan ekspor yang negative dan pertumbuhan impor positif walaupun pertumbuhan impor ini tidak terlalu signifikan.

3. Cadangan Devisa Indonesia

Posisi cadangan devisa suatu negara biasanya dinyatakan aman apabila mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidaknya-tidaknya tiga bulan. Jika cadangan devisa yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan untuk tiga bulan impor, maka hal itu dianggap rawan. Tipisnya persediaan valuta asing suatu negara dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara yang bersangkutan.

Bukan saja negara tersebut akan kesulitan mengimpor barang-barang yang dibutuhkannya dari luar negeri, tetapi juga memerosotkan kredibilitas mata uangnya. Kurs mata uangnya di pasar valuta asing akan mengalami depresiasi. Apabila posisi cadangan devisa itu terus menipis dan semakin menipis, maka dapat terjadi rush terhadap valuta asing di dalam negeri. Apabila telah demikian keadaannya, sering terjadi pemerintah negara yang bersangkutan akhirnya terpaksa melakukan devaluasi (Dumairy, 1996: 107). Sementara itu menurut *World Investment Report* 2003, kondisi cadangan devisa suatu pemerintahan dapat dinilai dari tiga parameter yaitu rasio cadangan devisa terhadap impor, rasio cadangan devisa terhadap hutang luar negeri jangka pendek dan rasio cadangan devisa terhadap jumlah uang beredar.

Tahun 1989 cadangan devisa Indonesia mencapai US \$ 11.835 juta, akan tetapi tahun 1990 turun menjadi US \$ 8.661 juta. Pada tahun 2005 cadangan devisa Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar minus 4,39

persen atau berjumlah US\$ 34.734 juta. Ini disebabkan karena faktor tingginya harga minyak dunia yang sempat menembus angka US\$ 68/barel sehingga berdampak terhadap membengkaknya pengeluaran untuk impor minyak. Sehingga kebutuhan devisa untuk membayar utang luar negeri juga cukup besar. Sementara itu tahun 2007 ke tahun 2008 cadangan devisa di Indonesia sempat mengalami penurunan. Faktor utama penyebab penurunan tersebut adalah krisis perekonomian global pada tahun 2008 yang menyebabkan menurunnya kinerja neraca pembayaran. Kinerja neraca pembayaran yang menurun secara langsung menyebabkan posisi cadangan devisa di Indonesia juga menurun di tahun itu. Peningkatan cadangan devisa terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar US\$ 96.207 juta dengan pertumbuhan 45,54 persen. Sementara penurunan cadangan devisa terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar US\$ 51.639 juta dengan pertumbuhan minus 9,28 persen. Penurunan ini dipicu oleh adanya krisis keuangan global yang

melanda mitra dagang Indonesia. Setelah itu di tahun 2009 cadangan devisa Indonesia mulai mengalami perkembangan sampai tahun 2012.

Namun tahun 2013 sempat mengalami penurunan kembali dan tahun 2014 naik.

Tabel 1 : Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia 1989 dan 2014 (Non Migas Dan Migas)

(Nilai : Juta US\$)

Tahun	Ekspor	Persentase Pertumbuhan	Impor	Persentase Pertumbuhan	Neraca Perdagangan	Cadangan Devisa
1989	22.158,9	-	16.359,6	-	5799.3	11.835
1990	25.673,3	15,86	21.837,0	33,48	3836.3	8.661
1991	29.142,4	13,51	25.868,8	18,46	3273.6	9.868
1992	33.967,0	16,56	27.279,6	5,45	6687.4	11.611
1993	36.823,0	8,41	28.327,8	3,84	8495.2	12.325
1994	40.053,4	8,77	31.983,5	12,90	8069.9	13.158
1995	45.418,0	13,39	40.628,7	27,03	4789.3	14.674
1996	49.814,8	9,68	42.928,5	5,66	6886.3	15.125
1997	53.443,6	7,29	41.679,8	- 2,91	11763.8	21.416
1998	48.847,6	- 8,60	27.336,9	- 33,59	21510.7	23.762
1999	48.665,4	-0,37	24.003,3	- 12,20	24662.1	27.054
2000	62.124,0	27,66	33.514,8	39,63	28609.2	29.394
2001	56.320,9	- 9,34	30.962,1	- 7,62	25358.8	28.018
2002	57.158,8	1,49	31.288,9	1,06	25869.9	32.039
2003	61.058,2	6,82	32.550,7	4,03	28507.5	36.296
2004	71.584,6	17,24	46.524,5	42,92	25060.1	36.320
2005	85.660,0	19,66	57.700,9	24,02	27959.1	34.724
2006	100.798,6	17,67	61.065,5	5,83	39733.1	42.586
2007	114.100,9	13,20	74.473,4	21,96	39627.5	56.639
2008	137.020,4	20,09	129.197,3	73,48	7823.1	51.639
2009	116.510,0	-14,97	96.829,2	- 25,05	19680.8	66.105
2010	157.779,1	35,42	135.663,3	40,11	22115.8	96.207
2011	203.496,6	28,98	177.435,6	30,79	26061	110.123
2012	190.020,3	-6,62	191.689,5	8,03	1669.2	112.781
2013	182.551,8	-3,93	186.628,7	2,64	- 4076.9	99.387
2014	176.292,5	-3,43	178.178,8	4,53	- 1886.3	111.862

Sumber : BPS

4.2 Peluang Penawaran Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)

Mengingat hasil ekspor sangat penting sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan nasional, maka suatu keharusan bagi Indonesia untuk mengembangkannya agar diperoleh

jumlah devisa dengan hasil ekspor semaksimal mungkin.

Pasar ekspor terbesar didunia sebetulnya adalah berada di Amerika Serikat, Jerman dan Jepang. Pasar ekspor tiga negara ini di incar oleh negara-negara pengekspor baik negara maju maupun negara berkembang. Dengan demikian negara-negara tersebut termasuk

Indonesia harus bersaing keras untuk bisa merebut pasar dalam usaha meningkatkan pangsa pasar bagi komoditi ekspor masing-masing negara. Disamping itu peluang penawaran perdagangan luar negeri semakin banyak diperoleh oleh Indonesia dengan ikut bergabungnya Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara. Kerja sama ekonomi antar negara ini dimulai dari ikutnya Indonesia sebagai anggota WTO, APEC, AFTA NAFTA, dan MEA yang membawa Indonesia ke arah pasar bebas. Pasar bebas adalah terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan internasional dan keluar masuknya arus modal serta tenaga kerja, sehingga persaingan semakin ketat antar negara.

Persaingan global yang merupakan karakteristik utama ekonomi menuju abad 21, mengakibatkan semakin terbuka yang ekonomi suatu negara terhadap dunia luar dan kondisi pasar mengarah ke pasar bebas dan adanya kecendrungan negara-negara di dunia membuat blok perdagangan dengan suatu komitmen mengurangi kesulitan pergerakan barang diantara mereka yang melakukan kesepakatan, sehingga mengakibatkan hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif dan non tarif semakin terkikis. Disamping itu persaingan

tersebut menuntut perubahan-perubahan yang cukup signifikan baik dalam teknologi, proses produksi, maupun disain produksi, serta memperbaiki efektivitas keputusan mengenai penentuan harga jual.

Untuk mendapatkan peluang penawaran perdagangan internasional tersebut dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam pemerintahan sekarang, dimana pada tanggal 23 Agustus 2013 telah mengumumkan 4 (empat) paket kebijakan ekonomi baru, yaitu :

Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:

1. mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor;
2. menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor;
3. menetapkan pajak barang mewah yang lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%; dan
4. memperbaiki ekspor mineral.

Paket kedua dibuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam paket ini,

pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:

1. memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman.
2. memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.

Paket ketiga dibuat untuk menjaga daya beli. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:

1. Berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi;
2. mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga.

Paket keempat dibuat untuk mempercepat investasi. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:

1. mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perijinan investasi;
2. mempercepat revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI);
3. mempercepat investasi di sektor yang berorientasi ekspor dengan memberikan insentif; dan
4. mempercepat renegotiasi kontrak karya pertambangan.

Disamping usaha mendapatkan peluang penawaran perdagangan internasional, pemerintah harus meningkatkan

kemampuan bersaing / daya saing dalam perdagangan internasional secara maksimal. Suatu negara dapat bersaing di pasar internasional dalam kondisi pasar bebas adalah apabila negara tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ada empat hal yang menjadi kunci peningkatan daya saing. Pertama, financial sector atau permodalan, kedua memperbaiki sistem logistic (kurangnya infrastruktur menyebabkan tingginya biaya logistik di dalam negeri) dan ketiga adalah dengan memperbaiki birokrasi. Sementara itu juga JK menyampaikan bahwa dengan memperbaiki empat hal diatas yakni financial sector, logistik, energi, dan birokrasi akan menjadi kekuatan yang sulit tersaingi di banyak negara lain.

Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas yang dimulai pada tahun 2003 di kawasan AFTA, tahun 2010 di kawasan Asean China dan tahun 2015 di kawasan sesama ASEAN. Apabila mampu meningkatkan daya saingnya, terbuka peluang untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun domestik. Sebaliknya apabila tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh pesaingnya. Oleh karena itu,

dalam menghadapi ini semua Indonesia harus mempercepat peningkatan daya saingnya. Peningkatan daya saing dapat dilihat dari sisi permintaan (*demand*) dan sisi penawaran (*supply*).

Dalam pemerintahan Jokowi-JK peningkatan daya saing nasional dilakukan dengan pembangunan infrastruktur. Lewat infrastruktur yang terintegrasi dan berkualitas baik, seluruh wilayah kita akan terkoneksi sehingga memudahkan terjadinya pergerakan barang, jasa dan manusia. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak penghematan biaya transportasi dan logistik. Dengan transportasi dan logistik yang lebih murah, maka ongkos produksi barang dan jasa juga lebih murah. Sehingga dapat bersaing dalam perdagangan internasional.

Disamping itu, Pemerintah RI dalam upaya meningkatkan daya saing mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2014 (1 September 2014). Melalui Inpres tersebut, Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan

terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional.

Peningkatan daya saing yang dilakukan pemerintah, utamanya dengan mengedepankan beberapa strategi dasar di antaranya:

1. Pengembangan industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengembangan industri kecil menengah; pengembangan SDM dan penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Pengembangan pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian, dan peningkatan akses pasar.
3. Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor.
4. Pengembangan energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.
5. Selain itu masih ada sepuluh sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional;

pengembangan perbankan;
investasi; usaha mikro, kecil, dan
menengah; tenaga kerja;
keehatan; perdagangan;
kepariwisataan; dan
kewirausahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Ekspor merupakan kegiatan yang dapat menciptakan penerimaan devisa sedangkan Impor merupakan kegiatan yang dapat mengurangi ketersediaan cadangan devisa dari suatu negara

Perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun mencerminkan peningkatan yang tidak berarti, hal ini disebabkan oleh kondisi perdagangan internasional yang telah mengarah pada pasar bebas

Dengan kondisi pasar bebas ini akan menciptakan peluang-peluang penawaran perdagangan luar negeri yang semakin luas, namun peluang ini tidak dengan mudah diperoleh karena kompetisi di pasar dunia tersebut sangat ketat

Untuk menuju meraih peluang tersebut diperlukan daya saing yang tinggi melalui comparative advantage atau kompetitif advantage.

Dengan kondisi pasar dunia yang menuju pada pasar bebas, dimana semakin terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan internasional dan untuk

meningkatkan kinerja perdagangan tidak lagi dengan cara pemberlakuan tarif dan non tarif tetapi commodity yang ditawarkan memiliki daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono. 1994. *Ekonomi Internasional*. BPF, Yogyakarta.
- BPS, Statistic Ekspor Indonesia
- Hady, Hamdy. 2009. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nopirin. 2014. *Ekonomi Internasional Edisi 3*. Yogyakarta: BPF
- Supranto, Cara memasuki pasar internasional dalam era globalisasi, (Majalah Bank & Manajemen) No. 15 Edisi Maret-April 1992.
- Salvatore, Dominick., Krugman. (Harris, penerjemah). 2004. *Ekonomi Internasioanl*. Edisi ke 5. Bandung: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sobri. 2001. *Ekonomi Internasioanl Teori Masalah dan Kebijakannya*. Yogyakarta: BPF-UI.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro ekonomi: Teori pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tambunan, T.T.H. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Ghalia Indonesia, jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2003, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan temuan Empiris*, LP3ES, Jakarta